

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PADA PENERIMAAN PESERTA  
DIDIK BARU SMA DI KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH  
(STUDI KASUS SMA NEGERI 2 PURWOKERTO DAN SMA NEGERI 1 BATURADEN)**

Angkito Wijaya Putra Aji

NPP. 30.0646

*Asdaf Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah*

*Program Studi Kebijakan Publik*

Email: angkito.aw@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Andi Azikin, M.Si

**ABSTRACT (in english)**

**Problem Statement/Background (GAP):** This study raises the title 'Implementation of the Zoning System Policy on Acceptance of New High School Students in Banyumas Regency (Case Study of SMA Negeri 2 Purwokerto and SMA Negeri 1 Baturaden)'. **Purpose:** The purpose of this research is to find out how the Implementation of the Zoning System Policy on Acceptance of New High School Students in Banyumas Regency (Case Study of SMA Negeri 2 Purwokerto and SMA Negeri 1 Baturaden), along with the inhibiting factors and also the efforts made to overcome obstacles to the implementation of the policy. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research method with an inductive approach. The data collection technique used is Interview, Observation and Documentation with data analysis techniques namely Qualitative Analysis. The focus of this study uses Edward III's theory which explains that policy implementation is strongly influenced by factors of Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. **Result:** Based on the results of the research, it shows that the Implementation of the Zoning System Policy on Acceptance of New High School Students in Banyumas Regency (Case Study of SMA Negeri 2 Purwokerto and SMA Negeri 1 Baturaden) has generally been going well. This can be seen from the fulfillment of the dimensions or theory used for the research results, namely the communication that has been carried out has gone well, clearly and consistently; the resources that are owned are also sufficient and adequate; the disposition or attitude of the policy implementor supports the implementation of the policy; and the bureaucratic structure in policy implementation has gone well because policy implementation is in accordance with SOPs and a clear division of responsibilities. The inhibiting factor is that there are still sub-districts that do not have public high schools so that people living in these sub-districts cannot attend public high schools. **Conclusion:** Efforts have been made to overcome obstacles in realizing the success of policy implementation, namely providing a special quota for people who wish to attend public high school regardless of zoning and planning for the development of public schools in districts that do not yet have public schools.

**Keywords:** *Implementation, Zoning System, Acceptance of New High School*

## ABSTRAK (in bahasa)

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penelitian ini mengangkat judul ‘Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMA di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus SMA Negeri 2 Purwokerto dan SMA Negeri 1 Baturaden)’. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMA di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus SMA Negeri 2 Purwokerto dan SMA Negeri 1 Baturaden), beserta faktor penghambat dan juga upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Implementasi kebijakan. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara, Observasi dan Dokumentasi dengan teknik analisis data yaitu Analisis Kualitatif. Fokus penelitian ini menggunakan teori Edward III yang menjelaskan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMA di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus SMA Negeri 2 Purwokerto dan SMA Negeri 1 Baturaden) secara umum sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya dimensi atau teori yang digunakan terhadap hasil penelitian, yaitu komunikasi yang dilakukan telah berjalan dengan baik, jelas dan konsisten; sumber daya yang dimiliki juga sudah mencukupi dan memadai; disposisi atau sikap yang dimiliki implementor kebijakan mendukung berjalannya kebijakan; dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan telah berjalan dengan baik karena implementasi kebijakan sudah sesuai dengan SOP serta pembagian tanggungjawab yang jelas. Faktor yang menjadi penghambat, yaitu masih ada kecamatan yang belum memiliki SMA negeri sehingga masyarakat yang tinggal di kecamatan tersebut tidak bisa bersekolah di SMA negeri. **Kesimpulan:** Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu menyediakan kuota khusus bagi masyarakat yang ingin bersekolah di SMA negeri tanpa memperhatikan zonasi serta perencanaan pembangunan sekolah negeri di kecamatan yang belum memiliki sekolah negeri.

**Kata Kunci : Implementasi, Penerimaan Peserta Didik Baru, Sistem Zonasi**

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Kehadiran penerapan kebijakan sistem zonasi ini, diharapkan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia dapat diselesaikan. Sistem zonasi bertujuan untuk menyetarakan kualitas pendidikan di semua sekolah dan juga menghilangkan label sekolah unggul atau sekolah favorit. Sistem zonasi diterapkan untuk mengubah paradigma “sekolah favorit” atau “sekolah unggul” yang selama ini melekat di masyarakat.

Pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021 pasal 11 dijelaskan mengenai tata cara kebijakan sistem zonasi. Kebijakan sistem zonasi ini juga berguna untuk menghilangkan praktik “jual bangku” yang selama ini kerap dilakukan oknum sekolah. Siswa rela membayar sejumlah uang agar dapat diterima di sekolah yang diinginkan demi sebuah gengsi dan eksistensi. Kebijakan ini juga menuntut sekolah dan guru agar lebih inovatif agar dapat menghadapi karakter dan kemampuan siswa yang beragam. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan kemampuan dan kapasitas guru dalam menggunakan pendekatan yang beragam. Diharapkan dengan adanya sistem zonasi ini, sekolah-sekolah lain dapat ikut berkembang, tidak kalah saing, dan berprestasi.

Kabupaten Banyumas juga turut serta dalam menerapkan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB. Untuk tingkat SMA sendiri, kewenangan sistem zonasi diatur oleh pihak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dimana di tiap beberapa wilayah terdapat Cabang Dinas. Untuk Kabupaten Banyumas dan

Kabupaten Cilacap sendiri terdapat Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X yang memiliki tugas membantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan sebagian tugas di bidang pengendalian Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa. Namun, pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Banyumas ini masih banyak menuai keluhan.

Sistem zonasi dalam pemeratakan kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan sekolah yang heterogen belum berjalan sesuai dengan harapan. Dominasi sekolah yang itu-itu saja dalam peringkat sekolah dengan jumlah nilai UN tertinggi membuktikan bahwa lingkungan sekolah tersebut masih bersifat homogen. Dimana lingkungan sekolah tersebut didominasi oleh murid-murid yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Sedangkan sekolah-sekolah yang lain didominasi oleh murid-murid yang sebaliknya.

Kebijakan sistem zonasi bertujuan untuk pemeratakan kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan sekolah dan kelas yang heterogen. Lingkungan sekolah dan kelas yang heterogen akan menimbulkan kreativitas dan juga produktivitas baik dari guru maupun dari siswa itu sendiri. Dengan beragamnya lingkungan di kelas dan sekolah juga akan membuat sekolah menjadi lebih berkembang dan tidak kalah saing dari sekolah yang lain.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Sistem zonasi dalam pemeratakan kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan sekolah yang heterogen belum berjalan sesuai dengan harapan. Dominasi sekolah yang itu-itu saja dalam peringkat sekolah dengan jumlah nilai UN tertinggi membuktikan bahwa lingkungan sekolah tersebut masih bersifat homogen. Dimana lingkungan sekolah tersebut didominasi oleh murid-murid yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Sedangkan sekolah-sekolah yang lain didominasi oleh murid-murid yang sebaliknya.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMAN 6 Bone Kecamatan Kahu Kabupaten Bone (Gustian, 2021)”, Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi yang dilakukan di Kabupaten Bone sudah dilaksanakan sesuai aturan Permendikbud No. 44 Tahun 2019. Penelitian yang berjudul “Implementasi Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Komparatif di SMAN 1 Sigli) (Mukhlis,2020)”, Implementasi Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 sudah terlaksana dengan cukup baik tetapi masih terdapat beberapa kendala.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Pada penelitian sebelumnya, fokus pembahasannya lebih luas karena terdiri dari beberapa sekolah yang dijadikan sampel. Sedangkan pada penelitian ini, hanya meneliti pada dua sekolah yaitu SMA Negeri 2 Purwokerto dan SMA Negeri 1 Baturraden. Dengan dua sampel tersebut akan memudahkan peneliti untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal mengingat waktu penelitian yang diberikan hanya 1 bulan.

### **1.5. Tujuan.**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMA di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus SMA Negeri 2 Purwokerto dan SMA Negeri 1 Baturraden), beserta faktor penghambat dan juga upaya

yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Implementasi kebijakan.

## **II. METODE**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif. Metode pendekatan kualitatif merupakan metode yang melakukan pendekatan kepada arti, konsep, defenisi, metafora, simbol dan deskripsi segala sesuatu. Pendekatan kualitatif adalah penyusunan penelitian dengan maksud untuk menciptakan data deskriptif yang berbentuk kata-kata dari orang-orang dan perilaku (Moleong, 2018:6). Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan guna meneliti suatu situasi dan kondisi pada objek yang bersifat alamiah. Pada metode ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci (key instrument). Ini artinya peneliti harus memiliki wawasan, pengetahuan serta pemahaman yang mendalam tentang permasalahan yang sedang dibahas agar peneliti dapat mengamati dan menganalisis objek yang diteliti (Sugiyono, 2016:102).

Selain menggunakan metode kualitatif dalam menjelaskan data yang diperoleh, peneliti juga menggunakan metode deskriptif. Metode ini digunakan dalam meneliti individu yang dilakukan melalui penilaian berdasarkan indikator-indikator tertentu. Tujuan dari dilaksanakannya penelitian secara deskriptif adalah untuk menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Gambaran dan deskripsi tersebut dibuat secara akurat, faktual, dan sistematis berdasarkan hubungan dengan fenomena yang terjadi.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik baru SMA di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus SMA Negeri 2 Purwokerto dan SMA Negeri 1 Baturaden)**

#### **3.1.1 Komunikasi**

Penyaluran komunikasi berkaitan dengan pelaksanaan implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB SMA di Kabupaten Banyumas tidak ada ditemukan permasalahan. Komunikasi yang dilakukan dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran selama ini berjalan dengan baik tanpa ada masalah. Sejak berlakunya sistem zonasi pada PPDB di tingkat SMA, kita selalu gencar untuk melakukan penyampaian atau sosialisasi kepada masyarakat selaku kelompok sasaran. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat benar-benar mengetahui dan memahami tujuan dan juga prosedur pelaksanaan sistem zonasi ini.

Dalam melakukan sosialisasi kebijakan sistem zonasi, sekolah lebih banyak mengandalkan sosialisasi dalam bentuk digital. Sekolah juga melakukan pemasangan banner-banner pada saat sebulan sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang menjelaskan apa yang ada di juknis. Kemudian secara terbatas dan apabila memungkinkan, sekolah juga melakukan sosialisasi dengan kunjungan ke SMP-SMP. Namun, sekarang kunjungan secara langsung di samping merepotkan juga terkendala di segi biaya.

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang apa maksud dan tujuan dari adanya kebijakan sistem zonasi ini. Selain itu, dilakukan sosialisasi tentang bagaimana sistem zonasi berjalan dan bagaimana prosedur sistem zonasi. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Tengah juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam melakukan sosialisasi agar informasi mengenai kebijakan sistem zonasi dapat tersebarluaskan kepada masyarakat dengan baik dan efektif.

Komunikasi yang dilakukan oleh Cabdin Wilayah X dan Satuan pendidikan dengan masyarakat di Kabupaten Banyumas telah berjalan dengan baik dan jelas. Dengan adanya komunikasi yang baik tentu saja dapat membuat implementasi kebijakan sistem zonasi dapat terlaksana dengan efektif. Orang tua siswa dan siswa yang akan ikut dalam kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dapat memahami mekanisme dan prosedur sistem zonasi karena telah mendapatkan sosialisasi dari pihak

pemerintah.

### **3.1.2 Sumber Daya**

Untuk kegiatan PPDB melalui sistem zonasi, sekolah melibatkan berbagai macam pihak yang berwenang dimana dalam hal ini seperti Dinas Kependudukan terkait dengan kevalidan data. Kemudian sekolah juga melibatkan Telkom terkait dengan sistem dan jaringan karena pendaftaran menggunakan sistem online. Artinya, sekolah berusaha melakukan sistem zonasi sesuai dengan keahlian dan kemampuan sumber daya manusia. Kepanitiaan tingkat daerah, dimana dalam hal ini adalah Kabupaten Banyumas, tidak hanya dari pegawai Cabdin saja tetapi sekolah juga melibatkan ahli-ahli sesuai bidangnya.

Sumber daya yang sekolah-sekolah miliki tentu sudah memadai. Dalam segi sumber daya manusia mereka memiliki pegawai yang memiliki kemampuan IT, mereka juga memiliki komputer yang menunjang dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi karena belakangan ini dalam pelaksanaan sistem zonasi mereka lebih banyak melakukannya secara online. Dalam PPDB mereka juga membentuk kepanitiaan yang terdiri dari guru dan pegawai yang ada di sekolah ini yang tentu saja memiliki kemampuan yang sudah paham mengenai pelaksanaan sistem zonasi.

### **3.1.3 Disposisi**

Tujuan dari adanya kebijakan zonasi adalah untuk melakukan pemerataan kualitas dan mutu sekolah. Tujuan ini merupakan hal yang baik agar semua sekolah memiliki kualitas yang sama-sama baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, implementor kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Banyumas dimana dalam hal ini Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Tengah memiliki sikap mendukung dan melakukan sistem zonasi sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Cabang Dinas berkomitmen untuk menjalankan penerapan dan mengamankan berjalannya sistem zonasi di wilayah Kabupaten Banyumas sebagai wilayah pangkuan cabang dinas. Artinya bahwa mereka menerapkan sistem zonasi ini sesuai dengan tugas dan kewenangan yang ada. Jadi, bisa dibayangkan untuk penerapan sistem zonasi di wilayah Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan aturan dan regulasi yang telah ditetapkan. Mereka sangat berkomitmen untuk melaksanakan sistem zonasi ini sebagai bentuk kebijakan pemerintah. Sekolah hanya melaksanakan tugas untuk mendukung program-program yang dilakukan pemerintah termasuk sistem zonasi. Tentu saja penerapan sistem zonasi ini telah dilakukan kajian baik di tingkat pusat dan provinsi. Jadi, sistem zonasi bukanlah sesuatu yang asal-asalan sehingga mereka percaya dan tinggal melakukannya. Komitmen mereka adalah menjalankan sistem zonasi karena mereka beranggapan hal tersebut adalah perintah.

### **3.1.4 Struktur Birokrasi**

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu prosedur atau pedoman dalam melaksanakan suatu tugas dan pekerjaan agar dapat terlaksana lebih mudah, lebih terstruktur, dan lebih tertib. SOP berisi tentang prosedur yang harus dilaksanakan secara kronologis agar suatu pekerjaan dapat terlaksana dan memperoleh hasil kerja yang efektif. SOP akan membuat pelaksana kebijakan lebih memahami apa saja yang harus dilakukan dan bermanfaat sebagai panduan pelaksana kebijakan dalam bekerja. Implementor harus patuh terhadap SOP yang dibuat agar kebijakan dapat terlaksana dengan lebih baik dan terstruktur. Dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Banyumas, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Tengah sudah memenuhi SOP yang ada dengan berpegang pada aturan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sebagai regulator di tingkat wilayah yang dituangkan dalam sebuah petunjuk teknis.

Untuk pelaksanaan PPDB ini, memang Dinas Pendidikan tidak bisa melaksanakannya sendiri.

Dibutuhkan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak. Koordinasi yang mereka lakukan adalah dengan melakukan rapat koordinasi di awal PPDB. Setiap satuan pendidikan juga mereka kondisikan dan fasilitasi untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dan juga kepolisian. Sistem zonasi ini merupakan sistem yang memiliki dinamika luar biasa sehingga dibutuhkan koordinasi yang baik antar pihak yang terlibat.

### **3.2 Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi pada PPDB Tingkat SMA di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus SMA Negeri 2 Purwokerto dan SMA Negeri 1 Baturraden)**

Kebijakan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat SMA di Kabupaten Banyumas merupakan kebijakan penerimaam peserta didik baru yang berlandaskan dari jarak rumah calon siswa ke sekolah yang diinginkan. Dalam pelaksanaan sistem zonasi ini, yang menjadi kendala adalah masih terdapatnya beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas yang belum memiliki sekolah negeri. Hal ini menyebabkan siswa yang tinggal di kecamatan tersebut dan jauh dari sekolah negeri tidak dapat bersekolah di sekolah negeri.

Kondisi yang dihadapi dalam penerapan sistem zonasi masih banyak wilayah di Jawa Tengah, khususnya untuk Kabupaten Banyumas, dimana masih ada kecamatan yang belum terdapat sekolah negeri. Ini yang menjadi permasalahan baik SMA maupun SMK. Di Kabupaten Banyumas sendiri saat ini terdapat 16 kecamatan yang belum terdapat SMA atau SMK negeri sehingga masyarakat yang berkeinginan bersekolah di sekolah negeri dan memiliki jarak yang cukup jauh otomatis zonasinya tidak masuk. Ini memang yang menjadi kendala mereka dalam sistem zonasi.

### **3.3 Upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala**

Dalam menghadapi kendala yang terdapat pada implementasi kebijakan sistem zonasi diperlukan upaya dan tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Tengah sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan sistem zonasi agar kebijakan dapat terimplementasi dengan baik. Selain itu, mereka juga mengoptimalkan kepada SMA swasta karena ada beberapa kecamatan yang belum memiliki SMA negeri namun memiliki SMA swasta. Nah, mereka mendorong SMA swasta untuk meningkatkan kualitasnya agar seimbang dengan SMA negeri atau SMK negeri. Mereka juga mendorong dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa menempuh pendidikan itu tidak harus di satuan pendidikan negeri karena satuan pendidikan negeri maupun swasta itu sama. Selain itu, mereka juga mempersilakan masyarakat yang ada di kecamatan yang belum terdapat sekolah negeri untuk mengusulkan adanya pembangunan sekolah negeri kepada gubernur melalui pemerintah kabupaten.

Dapat disimpulkan bahwa Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan berbagai upaya yang baik dalam menghadapi kendala sistem zonasi. Upaya yang dilakukan adalah menyediakan kuota khusus bagi masyarakat yang tinggal di kecamatan yang belum memiliki SMA negeri tanpa melihat zonasi. Selain itu, upaya yang dilakukan adalah mendorong SMA swasta untuk meningkatkan kualitasnya agar seimbang dengan SMA negeri. Masyarakat juga dapat mengusulkan adanya pembangunan sekolah negeri kepada gubernur melalui pemerintah kabupaten.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pemerintah perlu melakukan pembangunan bangunan SMA negeri di kecamatan yang belum memiliki SMA negeri. Pembangunan bangunan sekolah ini bertujuan agar masyarakat yang tinggal di kecamatan yang belum memiliki sekolah negeri tersebut dapat bersekolah di sekolah negeri dan

jarak dari rumah ke sekolah tidak jauh. Selain itu, pihak pemerintah juga harus selalu melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap berjalannya kebijakan sistem zonasi agar kebijakan sistem zonasi dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

Pihak Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Tengah harus memperluas wilayah zonasi di beberapa kecamatan agar kecamatan di Kabupaten Banyumas yang belum memiliki SMA Negeri dapat terjangkau oleh wilayah zonasi di kecamatan lain. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang berdomisili di kecamatan yang belum memiliki SMA Negeri dapat bersekolah di SMA Negeri walaupun terdapat di kecamatan lain.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti terkait Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dalam Penurunan Angka Kekerasan Anak di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMA di Kabupaten Banyumas ditinjau dari implementor dan kelompok sasaran, sosialisasi kebijakan yang dilakukan dan intensitas komunikasi sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari penyaluran komunikasi baik kepada pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran yang berjalan dengan baik serta pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai sistem zonasi dengan baik dan intens.
2. Sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMA di Kabupaten Banyumas yang dilihat dari indikator kemampuan implementor, tingkat pemahaman terhadap tujuan dan sasaran, dan kemampuan dalam menyampaikan program dan mengarahkannya sudah bisa dikatakan baik. Hal ini dibuktikan dengan implementor kebijakan sistem zonasi sudah memiliki kemampuan yang memadai serta sudah memahami tujuan dan sasaran dari kebijakan sistem zonasi. Implementor kebijakan juga telah mampu menyampaikan kebijakan dengan baik dan mampu mengarahkan para pihak yang terlibat pada kebijakan ini
3. Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMA di Kabupaten Banyumas yang dilihat dari sikap implementor dan komitmen implementor sudah cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari sikap implementor yang mendukung dan berkomitmen terhadap kebijakan ini.
4. Struktur organisasi dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMA di Kabupaten Banyumas yang ditinjau dari kepatuhan implementor terhadap SOP dan koordinasi yang dilakukan sudah cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari sikap implementor yang mematuhi dan mengikuti SOP. Selain itu, pihak pemerintah juga melakukan koordinasi yang baik dengan pihak yang terlibat terhadap kebijakan.
5. Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMA di Kabupaten Banyumas adalah di Kabupaten Banyumas sendiri terdapat 16 kecamatan yang belum memiliki sekolah negeri, baik SMA maupun SMK. Hal ini mengakibatkan masyarakat yang ingin bersekolah di sekolah negeri tidak masuk ke dalam zonasi karena di kecamatan tempat dia tinggal tidak terdapat sekolah negeri dan jarak dari rumahnya ke sekolah negeri di kecamatan jauh.
6. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMA di Kabupaten Banyumas adalah menyediakan kuota khusus bagi masyarakat yang tinggal di kecamatan yang belum memiliki SMA negeri tanpa melihat zonasi. Selain itu, upaya yang dilakukan adalah mendorong SMA swasta untuk

meningkatkan kualitasnya agar seimbang dengan SMA negeri. Masyarakat juga dapat mengusulkan adanya pembangunan sekolah negeri kepada bupati melalui pemerintah kecamatan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih jauh dari sempurna mengingat keterbatasan waktu, pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan di masa mendatang

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada fokus serupa berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi pada PPDB Tingkat SMA.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Purwokerto, dan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Baturraden yang telah membimbing, memberikan arahan, dan memberikan informasi selama penelitian, serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Laporan Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, sekali lagi terima kasih atas semua doa restu dan dukungan yang telah diberikan..

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anderson, J. E. (1979). *Public Policy-making*. Hold McDougal.
- Arikunto, S. (2011). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Darmadi, H. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Denzin, N. K. (2011). *Handbook of Qualitative Research (4th ed.)*. Sage Publication.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UGM Press.
- Dye, T. R. (1992). *Understanding Public Policy*. Prentice Hall.
- Edwards, G. (1980). *Implementing Public Policy*. CQ Press.
- Esterberg, K. (2002). *Qualitative Methods in Social Research*. Mc.Graw Hill.
- Grindle, M. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Gustian. (2021). *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Di SMAN 6 Bone Kecamatan Kahu Kabupaten Bone*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Harsono, H. (2002). *Implementasi Kebijakan dan Publik*. Grafindo Jaya.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Miles, M. B., & Hubberman, M. (2009). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. UI Press.
- Moleong, P. D. L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo.
- Salim, & Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian*. Citapustaka Media.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar.

- Sugiyono, D. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. In Bandung Alf (p. 143).
- Suharno. (2013). Dasar-dasar Kebijakan Publik : Kajian Proses dan Analisis Kebijakan. Penerbit Ombak.
- Sukmadinata. (2017). Metode Penelitian Pendidikan. 79–92.
- Wardana, M. W. (2020). Implementasi Permendikbud No 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Komparatif di SMAN 1 Sigli dan SMKN 1 Sigli. 44, 1–89.

